



Dinamika dan Tantangan Kelembagaan Ekonomi Islam: Studi Komparatif antara Arab Saudi dan Rusia

Fauzan¹⁾, Naufal Luthfi Alifa²⁾

¹⁾ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²⁾ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

fauzanpbr5@gmail.com¹⁾ alifanaufaal@gmail.com²⁾

<https://doi.org/10.62097/al-tsamana.v8i01.2754>

Received: 25-05-2026

Revised: 28-05-2026

Accepted: 31-05-2026

Info Artikel

KEYWORDS:

Islamic Economic
Institutions, Saudi Arabia,
Russia.

Abstract

This study aims to analyze the dynamics and challenges of Islamic economic institutions through a comparative approach between Saudi Arabia and Russia, two countries with significantly different economic systems, demographic structures, and regulatory frameworks. This research employs a qualitative method based on a literature review by examining various scientific publications and empirical findings over the past ten years. The analysis focuses on regulatory quality, institutional capacity, and social legitimacy in supporting the development of Islamic economics in both countries. The findings indicate that Saudi Arabia has a more established and structured Islamic economic institutional framework, supported by centralized regulation, fiscal stability, and strong social legitimacy toward Islamic finance. In contrast, Russia faces several constraints, including the absence of federal regulation, low public literacy, and limited bureaucratic capacity, resulting in fragmented and uneven development of Islamic economic institutions. This comparison highlights that the success of Islamic economic institutions is largely determined by regulatory quality, policy coordination, and societal support.

KATA KUNCI:

Kelembagaan Ekonomi
Islam, Arab Saudi, Rusia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika serta tantangan kelembagaan ekonomi Islam melalui pendekatan komparatif antara Arab Saudi dan Rusia sebagai dua negara dengan karakteristik sistem ekonomi, demografi, dan kerangka regulasi yang berbeda secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah dan temuan empiris dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Fokus analisis diarahkan pada kualitas regulasi, kapasitas institusional, serta legitimasi sosial dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki kelembagaan ekonomi Islam yang lebih matang dan terstruktur, didukung oleh regulasi terpusat, stabilitas fiskal, serta tingginya legitimasi sosial terhadap sistem keuangan syariah. Sebaliknya, Rusia menghadapi kendala berupa ketiadaan regulasi federal, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan kapasitas birokrasi yang menyebabkan perkembangan ekonomi Islam bersifat parsial dan tidak merata. Perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan ekonomi Islam sangat ditentukan oleh kualitas regulasi, koordinasi kebijakan, serta dukungan sosial masyarakat

PENDAHULUAN

Kelembagaan ekonomi Islam secara ideal berkembang melalui tiga pilar utama, yaitu kekuatan regulasi, legitimasi sosial, dan efektivitas institusi keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam teori kelembagaan, regulasi yang kuat memainkan peran sentral dalam meningkatkan ketahanan dan efisiensi lembaga keuangan syariah, sehingga negara dengan kerangka hukum yang baik seharusnya menampilkan perkembangan institusi keuangan Islam yang lebih maju (Hassan et al. 2020). Selain itu, teori institusional menyatakan bahwa kualitas tata kelola publik dan kepastian hukum menentukan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediari secara optimal di tengah dinamika ekonomi global (Abduh et al. 2022).

Kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kondisi ideal kelembagaan ekonomi Islam dengan realitas implementasinya di berbagai negara, khususnya dalam perbandingan antara Arab Saudi dan Rusia. Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan perkembangan kelembagaan ekonomi Islam yang paling pesat. Berdasarkan laporan IMF *Financial System Stability Assessment* (2024), pangsa produk syariah dalam total aset perbankan Arab Saudi telah melampaui 75 persen, menjadikannya pasar keuangan syariah terbesar di dunia dengan kontribusi 33 persen dari total aset perbankan syariah global (SAMA/IFSB, 2023). Keberhasilan ini ditopang oleh regulasi syariah yang komprehensif dan sistem pengawasan terpusat yang mampu meningkatkan konsistensi standar serta mengurangi risiko institusional (Alharbi 2021). Stabilitas tersebut juga diperkuat oleh efektivitas kerangka regulasi yang telah lama dibangun oleh otoritas keuangan negara (Alam et al. 2019).

Berbeda dengan Arab Saudi, Rusia menghadapi dinamika kelembagaan yang jauh lebih kompleks. Jumlah penduduk Muslim di Rusia diperkirakan melebihi dua puluh lima juta jiwa, namun hingga 2023 total aset keuangan syariah nasional belum mencapai satu persen dari keseluruhan aset perbankan negara. Salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah ketiadaan regulasi federal yang secara khusus mengatur produk dan operasional lembaga keuangan syariah, sehingga pengembangan keuangan Islam berlangsung secara terbatas (Bekkin 2019). Studi lain menunjukkan bahwa aktivitas keuangan syariah di Rusia masih terpusat di wilayah tertentu seperti Tatarstan karena ketidakpastian regulasi nasional yang membatasi ruang gerak institusi keuangan Islam (Garaev 2020). Temuan yang lebih mutakhir juga mengungkapkan bahwa kualitas kelembagaan publik di Rusia masih menjadi kendala signifikan dalam mempercepat adopsi dan ekspansi layanan keuangan syariah di tingkat nasional (Gubareva et al. 2023).

Perbedaan antara harapan teoritis dan realitas empiris tersebut menegaskan urgensi penelitian ini. Arab Saudi menunjukkan bagaimana dukungan regulasi yang kuat dan stabilitas institusional mampu melahirkan perkembangan ekonomi Islam yang substansial. Sebaliknya, Rusia yang memiliki komunitas Muslim besar justru belum mampu mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam secara optimal karena lemahnya kepastian hukum dan struktur regulasi yang belum mendukung. Kontradiksi ini penting untuk dianalisis melalui pendekatan komparatif agar dapat memahami bagaimana kualitas institusi, struktur regulasi, dan legitimasi sosial berperan dalam menentukan keberhasilan ekonomi Islam pada konteks yang berbeda. Dengan merujuk pada temuan empiris terbaru dan literatur internasional, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi dan Rusia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk perkembangan ekonomi Islam secara nyata (Saleem et al. 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada analisis kritis terhadap literatur ilmiah mengenai dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi dan Rusia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian komparatif yang mengkaji aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan kualitas institusi pada dua negara yang berbeda sangat bergantung pada data konseptual dan temuan empiris yang telah terdokumentasi dalam publikasi ilmiah (Hassan et al. 2020). Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi temuan, dan sintesis argumentatif. Tahap pertama berupa seleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian, mencakup aspek regulasi, kualitas kelembagaan, dan dinamika institusi keuangan syariah. Tahap kedua adalah mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang sesuai dengan struktur pembahasan penelitian ini. Tahap ketiga adalah menyusun interpretasi komparatif berdasarkan kesesuaian teori dengan temuan empiris dari kedua negara, termasuk menelaah pola kesenjangan antara model ideal dan realitas kelembagaan ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Profil Geografis, Demografis, dan Perekonomian Negara Arab Saudi dan Rusia

Pemilihan Arab Saudi dan Rusia sebagai objek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan kontras kelembagaan yang signifikan di antara keduanya. Arab Saudi merepresentasikan negara dengan mayoritas Muslim yang telah membangun ekosistem keuangan syariah secara sistematis dan mendapat dukungan penuh dari regulasi negara, sehingga menjadi salah satu rujukan utama perkembangan kelembagaan ekonomi Islam secara global (IFSB 2023). Sebaliknya, Rusia merepresentasikan negara dengan minoritas Muslim yang signifikan namun beroperasi dalam sistem ekonomi sekuler tanpa regulasi syariah federal yang komprehensif (Bekkin 2019). Perbandingan antara dua konteks yang secara struktural berbeda ini memungkinkan analisis yang lebih tajam mengenai

faktor-faktor penentu keberhasilan kelembagaan ekonomi Islam, baik dari sisi regulasi, legitimasi sosial, maupun kapasitas institusional

Arab Saudi dan Rusia memiliki karakteristik geografis dan demografis yang sangat berbeda, dan perbedaan ini secara langsung memengaruhi pola perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara. Arab Saudi terletak di kawasan Timur Tengah dengan kondisi geografis yang sebagian besar berupa gurun dan wilayah kering. Kondisi tersebut membuat struktur ekonominya sangat bergantung pada sektor minyak dan gas, yang memberikan penerimaan negara besar dan memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur kelembagaan keuangan yang stabil. Di sisi lain, Rusia memiliki wilayah geografis terbesar di dunia yang mencakup berbagai iklim dan zona ekonomi, dari kawasan industri berat hingga pertanian. Keberagaman geografis ini menciptakan tantangan tersendiri terkait pemerataan layanan keuangan syariah karena distribusi penduduk Muslim yang tidak merata (Bekkin 2019).

Dari sisi demografi, Arab Saudi memiliki populasi mayoritas Muslim dengan tingkat homogenitas sosial yang tinggi, sehingga legitimasi sosial untuk penerapan ekonomi Islam sangat kuat. Dukungan masyarakat ini menjadi landasan penting bagi tumbuhnya institusi keuangan syariah karena preferensi penduduk terhadap produk keuangan berbasis syariah mendorong permintaan pasar yang stabil. Sebaliknya, Rusia memiliki populasi yang didominasi non-Muslim dengan konsentrasi komunitas Muslim terbesar di wilayah Volga, Dagestan, Chechnya, dan Tatarstan. Struktur ini menyebabkan layanan keuangan syariah hanya berkembang di wilayah tertentu tanpa dukungan penuh dari pasar domestik secara nasional (Garaev 2020).

Struktur ekonomi kedua negara juga menunjukkan perbedaan mendasar. Arab Saudi memiliki ekonomi dengan pilar utama sektor minyak, tetapi dalam dua dekade terakhir negara ini mulai melakukan diversifikasi melalui program Saudi Vision 2030. Kebijakan ini membuka ruang bagi penguatan industri keuangan dan memperluas infrastruktur kelembagaan, termasuk sektor keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adanya visi pembangunan jangka panjang memberikan landasan kuat bagi pengembangan institusi syariah serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan finansial non-konvensional (Alharbi 2021).

Rusia memiliki struktur ekonomi yang lebih kompleks, dengan porsi besar pada industri energi, pertahanan, metalurgi, dan manufaktur berat. Ekonomi negara ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, termasuk sanksi internasional, yang turut memengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional. Karena sistem keuangan Rusia didominasi oleh bank-bank konvensional berbasis bunga, ruang bagi institusi keuangan syariah menjadi terbatas. Kondisi ini semakin diperkuat oleh ketiadaan regulasi federal yang secara jelas mengatur keuangan Islam, sehingga tidak tersedia infrastruktur hukum yang dapat mendukung pertumbuhan institusi syariah secara masif (Gubareva et al. 2023).

Keberhasilan Arab Saudi dalam membangun institusi ekonomi Islam juga dipengaruhi oleh dukungan fiskal yang kuat. Pendapatan negara yang tinggi dari sektor minyak memungkinkan pemerintah membiayai pengembangan lembaga keuangan syariah dan menyediakan kerangka kerja regulasi yang terstruktur. Stabilitas fiskal dan makroekonomi yang relatif terjaga turut meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan syariah Saudi. Kondisi ini sejalan dengan temuan literatur yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi dan dukungan negara berperan langsung dalam meningkatkan stabilitas dan efisiensi bank syariah (Abduh et al. 2022). Sebaliknya, keterbatasan fiskal dan fokus kebijakan yang lebih mengarah pada sektor industri berat membuat Rusia tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengembangan ekonomi Islam. Pemerintah Rusia lebih menekankan penguatan industri strategis nasional ketimbang pembangunan alternatif sistem keuangan berbasis syariah. Faktor ini memperkuat kesenjangan antara potensi pasar Muslim Rusia dan perkembangan kelembagaan ekonomi Islam yang masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan studi yang menyatakan bahwa kualitas institusi publik dan birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem keuangan syariah di negara dengan sistem ekonomi campuran (Saleem et al. 2022).

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa profil geografis, demografis, dan struktur ekonomi Arab Saudi dan Rusia memiliki dampak langsung terhadap arah perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di masing-masing negara. Arab Saudi memperoleh dukungan dari homogenitas demografis, kekuatan fiskal, dan kestabilan regulasi, sedangkan Rusia menghadapi hambatan berupa penyebaran populasi Muslim yang tidak merata, ketidakpastian regulasi, dan struktur ekonomi yang kurang mendukung. Perbedaan karakteristik ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana dinamika kelembagaan ekonomi Islam berkembang secara berbeda pada kedua negara.

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Arab Saudi dan Rusia

Dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi menunjukkan konsistensi antara desain regulasi, kapasitas institusional, dan kebutuhan pasar yang berbasis pada preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Pemerintah Saudi melalui otoritas keuangan nasional telah membentuk sistem pengawasan terpadu yang memastikan seluruh produk keuangan syariah mengikuti prinsip syariah dan standar tata kelola yang ketat. Regulasi yang jelas dan konsisten ini berperan penting dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan syariah serta mendorong inovasi produk, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan empiris mengenai efektivitas kebijakan regulasi di sektor perbankan syariah (Alharbi 2021).

Penguatan kelembagaan di Arab Saudi juga tampak dari integrasi antara kebijakan keuangan syariah dan kerangka pembangunan nasional seperti Saudi Vision 2030. Program ini menempatkan sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, sebagai pilar penting diversifikasi ekonomi. Sinergi antara kebijakan makro dan sektor keuangan syariah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank syariah, lembaga pembiayaan mikro syariah, serta pasar modal syariah untuk berkembang secara signifikan. Studi

empiris juga menunjukkan bahwa bank syariah di Saudi memiliki tingkat efisiensi dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan beberapa negara GCC lainnya berkat desain tata kelola dan pengawasan yang kuat (Alam et al. 2019). Sebaliknya, dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Rusia memperlihatkan perkembangan yang belum stabil dan cenderung terfragmentasi. Ketiadaan regulasi federal mengenai keuangan syariah menyebabkan institusi yang mencoba beroperasi harus menyesuaikan diri dengan regulasi perbankan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menciptakan hambatan operasional serta meningkatkan risiko hukum bagi lembaga keuangan syariah, sehingga perkembangan ekonomi Islam lebih banyak bergantung pada inisiatif regional seperti Republik Tatarstan (Bekkin 2019). Fragmentasi kelembagaan ini juga menyebabkan standar kelembagaan tidak seragam di berbagai wilayah di Rusia.

Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya regional di Rusia yang mencoba memperkuat struktur kelembagaan keuangan syariah. Tatarstan misalnya, telah mengembangkan berbagai inisiatif termasuk pembiayaan syariah, sukuk regional, dan lembaga pelatihan keuangan Islam untuk memperluas kapasitas institusional lokal. Meskipun langkah ini menunjukkan potensi, perkembangan tersebut belum dapat direplikasi secara nasional karena tidak adanya kerangka hukum nasional yang mendukung implementasi sistem keuangan Islam secara formal (Garaev 2020). Kondisi ini menjadikan dinamika kelembagaan keuangan syariah di Rusia bersifat parsial dan tidak terkoordinasi secara nasional.

Kualitas kelembagaan publik juga menjadi faktor penentu perbedaan dinamika kelembagaan ekonomi Islam pada kedua negara ini. Arab Saudi memiliki sistem birokrasi dan mekanisme perumusan kebijakan yang terpusat, sehingga implementasi kebijakan pada sektor keuangan syariah lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, Rusia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas birokrasi dan efisiensi regulasi, yang secara tidak langsung memperlambat proses penguatan kelembagaan keuangan syariah di tingkat nasional. Temuan penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola publik menjadi salah satu hambatan utama yang membatasi percepatan pengembangan layanan keuangan syariah di Rusia (Gubareva et al. 2023).

Dinamika perbedaan ini juga dipengaruhi oleh preferensi sosial masyarakat. Di Arab Saudi, legitimasi keuangan syariah sangat kuat karena didukung oleh mayoritas Muslim dan budaya keagamaan yang dominan. Hal ini membuat produk keuangan syariah memiliki permintaan yang tinggi dan meningkatkan daya saing pasar. Sebaliknya, preferensi masyarakat di Rusia lebih condong kepada sistem keuangan konvensional, dan pemahaman mengenai keuangan syariah relatif rendah karena penyebaran informasi dan literasi yang terbatas. Faktor sosial ini semakin membatasi potensi berkembangnya institusi keuangan syariah secara nasional (Abduh et al. 2022).

Secara umum, dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi menunjukkan pola pertumbuhan yang terstruktur dan berorientasi pada stabilitas serta inovasi. Sementara itu, dinamika di

Rusia bersifat parsial dan belum stabil karena keterbatasan regulasi, kapasitas kelembagaan yang belum berkembang, serta rendahnya legitimasi sosial terhadap keuangan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan ekonomi Islam ditentukan oleh sinergi antara regulasi, dukungan kelembagaan, kapasitas birokrasi, dan preferensi pasar.

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam Global di Arab Saudi dan Rusia

Tantangan utama dalam penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Meskipun regulasi dan infrastruktur keuangan syariah sudah matang, tekanan global terhadap ekonomi berbasis hidrokarbon menuntut Arab Saudi untuk memastikan bahwa sektor keuangan syariah mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, liberalisasi keuangan global juga mendorong kebutuhan harmonisasi standar syariah agar tetap kompetitif dalam lanskap keuangan internasional. Tantangan ini menegaskan pentingnya inovasi kelembagaan dan penguatan tata kelola berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyoroti hubungan antara kualitas regulasi dan daya tahan institusi keuangan syariah (Alharbi 2021).

Di Rusia, tantangan yang dihadapi jauh lebih fundamental. Ketiadaan regulasi federal keuangan syariah menjadi hambatan terbesar yang menghalangi pertumbuhan kelembagaan ekonomi Islam di negara tersebut. Tanpa payung hukum yang jelas, institusi keuangan syariah tidak memiliki kepastian legal untuk mengembangkan produk simpanan dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Kondisi ini diperparah oleh dominasi sistem perbankan konvensional yang telah lama mapan dan menjadi struktur utama dalam sistem keuangan Rusia (Bekkin 2019). Ketidakpastian regulasi juga membuat investor dan pelaku industri enggan berpartisipasi dalam pengembangan produk keuangan syariah karena risiko operasional dan hukum yang tinggi. Selain kendala regulasi, tantangan lain yang dihadapi Rusia adalah rendahnya literasi publik dan kurangnya pemahaman mengenai konsep ekonomi Islam. Meskipun memiliki populasi Muslim besar, penyebaran literasi keuangan syariah sangat terbatas dan terfokus di wilayah tertentu seperti Tatarstan. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat menghambat permintaan pasar terhadap produk syariah, yang pada gilirannya membuat lembaga keuangan syariah sulit berkembang secara berkelanjutan (Garaev 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada kerangka hukum tetapi juga pada legitimasi sosial dan literasi publik.

Strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi dapat diarahkan pada penguatan inovasi produk, digitalisasi layanan keuangan syariah, dan peningkatan integrasi dengan standar internasional. Saudi Vision 2030 menjadi kerangka strategis utama yang mendorong sektor keuangan

untuk mengadopsi teknologi finansial dan memperluas produk syariah ke ranah investasi, pasar modal, dan pembiayaan mikro. Penguatan inovasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, terutama bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terakomodasi oleh sistem keuangan formal (Alam et al. 2019). Selain itu, harmonisasi standar syariah dengan lembaga internasional dapat meningkatkan daya saing sektor keuangan Saudi dalam pasar global. Sementara itu, strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Rusia harus dimulai dari pembentukan kerangka hukum yang jelas dan terkoordinasi di tingkat nasional. Regulasi federal mengenai keuangan syariah menjadi prasyarat utama untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan ruang bagi institusi keuangan syariah untuk beroperasi tanpa hambatan legal. Selain itu, Rusia perlu mengembangkan program literasi keuangan syariah yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan karakteristik ekonomi Islam. Studi terbaru menunjukkan bahwa kualitas institusi publik dan efektivitas birokrasi memiliki pengaruh signifikan dalam mempercepat adopsi layanan keuangan syariah di negara dengan struktur populasi majemuk (Gubareva et al. 2023).

Strategi lainnya adalah memperluas peran wilayah yang telah berhasil mengembangkan keuangan syariah seperti Tatarstan sebagai model nasional. Penguatan kapasitas institusi lokal, pembentukan pusat riset ekonomi Islam, serta integrasi dengan industri halal dapat menjadi langkah efektif untuk memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi Islam di Rusia. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri dapat mempercepat proses standarisasi kelembagaan dan membuka ruang untuk penetrasi pasar yang lebih luas. Pendekatan ini juga dapat mengurangi kesenjangan antara potensi pasar Muslim Rusia dan perkembangan institusi syariah yang selama ini terhambat oleh ketidaksinkronan kebijakan nasional (Saleem et al. 2022).

Dengan demikian, perbandingan antara Arab Saudi dan Rusia menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi, kualitas institusi publik, legitimasi sosial, dan strategi pengembangan jangka panjang. Arab Saudi telah berhasil membangun ekosistem kelembagaan yang stabil melalui kombinasi kebijakan terpusat, dukungan fiskal, dan program pembangunan nasional. Sementara itu, Rusia masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang menghalangi perkembangan keuangan syariah secara komprehensif, meskipun terdapat potensi besar dari sisi demografi. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan ekonomi Islam memerlukan sinergi antara regulasi, literasi publik, kapasitas institusional, dan strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Arab Saudi dan Rusia

Pengalaman Arab Saudi dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam hal konsistensi regulasi dan kekuatan tata kelola.

Regulasi yang jelas dan terpusat memungkinkan sektor keuangan syariah di Saudi berkembang dengan stabil dan efisien. Pemerintah Saudi menunjukkan bagaimana stabilitas makro, koordinasi antar-lembaga, dan standar syariah yang seragam dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas regulasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan institusi keuangan syariah (Alharbi 2021). Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkuat harmonisasi regulasi antara OJK, BI, DSN-MUI, dan kementerian terkait agar pengembangan ekonomi syariah berjalan lebih terarah.

Di sisi lain, kondisi Rusia mencerminkan tantangan yang mungkin juga dihadapi Indonesia jika konsolidasi kelembagaan tidak dilakukan secara optimal. Keterlambatan Rusia dalam membangun fondasi hukum bagi keuangan syariah menunjukkan pentingnya kepastian regulasi sebagai prasyarat utama pengembangan ekonomi Islam. Tanpa dukungan regulasi yang komprehensif, inovasi produk dan penetrasi pasar akan sulit berkembang. Temuan penelitian yang menyoroti hambatan regulasi di Rusia (Bekkin 2019) dapat menjadi cerminan bagi Indonesia untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan memastikan koordinasi antar-lembaga berlangsung secara konsisten.

Pengalaman Rusia juga menekankan pentingnya distribusi literasi keuangan syariah yang merata. Rendahnya literasi publik membuat perkembangan ekonomi Islam di Rusia terbatas pada wilayah tertentu seperti Tatarstan (Garaev 2020). Kondisi ini menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa literasi keuangan syariah tidak boleh hanya terpusat di daerah tertentu saja. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu memastikan bahwa literasi dan pemahaman terhadap produk keuangan syariah merata di seluruh wilayah. Penguatan literasi akan meningkatkan permintaan masyarakat dan memperluas penetrasi pasar lembaga keuangan syariah nasional.

Keberhasilan Arab Saudi dalam menghubungkan regulasi, strategi pembangunan nasional, dan inovasi sektor keuangan dapat dijadikan model bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Program Saudi Vision 2030 menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Islam dapat menjadi bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional (Alam et al. 2019). Indonesia dapat mempelajari bagaimana integrasi ekonomi syariah ke dalam blueprint pembangunan nasional akan memberikan arah jangka panjang, memperkuat koordinasi kelembagaan, dan menarik investasi internasional ke sektor keuangan syariah.

Selain itu, dinamika di kedua negara menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan ekonomi Islam. Arab Saudi memiliki birokrasi yang lebih terpusat dan responsif, sementara Rusia menghadapi kendala dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas institusi publik (Gubareva et al. 2023). Bagi Indonesia, penguatan kapasitas birokrasi yang menangani kebijakan ekonomi syariah, termasuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki koordinasi internal, merupakan langkah strategis untuk

memperkuat kelembagaan ekonomi Islam nasional. Pengalaman Rusia juga menunjukkan bahwa desentralisasi tanpa koordinasi yang kuat dapat menyebabkan perkembangan yang tidak merata. Keuangan syariah di Rusia maju di Tatarstan tetapi stagnan di wilayah lain. Hal ini relevan bagi Indonesia yang memiliki karakteristik desentralisasi tinggi dan keberagaman daerah. Untuk menghindari ketimpangan perkembangan ekonomi syariah, Indonesia perlu merancang model kelembagaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah tanpa kehilangan koordinasi kebijakan nasional. Fragmentasi kebijakan harus dihindari agar stabilitas industri keuangan syariah tidak terganggu.

Oleh Karena itu, refleksi perbandingan antara Arab Saudi dan Rusia memberikan gambaran bahwa keberhasilan kelembagaan ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, koordinasi kebijakan, kapasitas birokrasi, literasi publik, dan integrasi dalam agenda pembangunan nasional. Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi syariah dengan memanfaatkan pembelajaran dari keberhasilan Saudi dan menghindari hambatan struktural yang dialami Rusia. Temuan ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi Islam di Indonesia bergantung pada kemampuan negara dalam membangun fondasi kelembagaan yang kokoh serta strategi jangka panjang yang berpihak pada efisiensi, inklusivitas, dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi dan Rusia dipengaruhi secara kuat oleh kualitas regulasi, kapasitas institusional, dan legitimasi sosial. Arab Saudi memiliki ekosistem kelembagaan yang matang karena didukung oleh regulasi terpusat, stabilitas fiskal, serta preferensi masyarakat yang tinggi terhadap layanan keuangan syariah. Lingkungan ini memungkinkan sektor keuangan syariah tumbuh secara stabil, inovatif, dan terintegrasi dengan agenda pembangunan jangka panjang negara. Sebaliknya, Rusia menghadapi hambatan struktural berupa ketiadaan regulasi federal, kapasitas birokrasi yang belum konsisten, serta literasi keuangan syariah yang rendah sehingga perkembangan kelembagaan ekonomi Islam tidak merata dan terfokus pada wilayah tertentu seperti Tatarstan. Perbandingan kedua negara menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh kekuatan regulasi dan koordinasi kebijakan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa kesenjangan antara teori ideal kelembagaan dan realitas empiris dapat dijelaskan melalui perbedaan kualitas tata kelola publik, legitimasi sosial, dan kesiapan regulasi dalam mendukung operasional institusi keuangan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi dan Rusia, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pengembangan ekonomi Islam, khususnya bagi negara yang menghadapi tantangan regulasi dan koordinasi kelembagaan seperti Indonesia. Pengalaman Arab Saudi menunjukkan bahwa konsistensi regulasi, koordinasi pengawasan, dan harmonisasi standar syariah merupakan fondasi penting dalam

menciptakan ekosistem keuangan syariah yang stabil dan inovatif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, terutama antara otoritas keuangan, regulator syariah, dan kementerian teknis, agar seluruh kebijakan terkait ekonomi Islam berjalan dalam kerangka regulasi yang selaras. Stabilitas regulasi yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sektor industri terhadap layanan keuangan syariah.

Selain itu, peningkatan kapasitas birokrasi dan literasi publik menjadi hal yang sangat penting. Kasus Rusia menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat dan ketidaksiapan institusi publik dapat menghambat perkembangan keuangan syariah meskipun memiliki potensi pasar yang besar. Untuk itu, program literasi keuangan syariah perlu diperluas secara nasional dan dirancang lebih inklusif agar pemahaman masyarakat mengenai produk dan prinsip keuangan syariah semakin merata. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan keuangan syariah juga menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh kendala administratif.

Terakhir, pengalaman Arab Saudi melalui program Saudi *Vision* 2030 memperlihatkan bahwa integrasi ekonomi syariah dalam agenda pembangunan nasional dapat mempercepat transformasi sektor keuangan dan memperkuat posisi institusionalnya di tingkat global. Indonesia dapat mempelajari pendekatan ini dengan mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah dalam rencana pembangunan jangka panjang, sehingga tidak hanya menjadi program sektoral tetapi bagian strategis dari roadmap ekonomi negara. Dengan demikian, penguatan kelembagaan ekonomi Islam dapat berjalan lebih terarah, mendapat dukungan fiskal yang lebih jelas, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Putri *et al.*, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Hasan, S. M., & Pananjung, A. (2022). Institutional determinants of Islamic bank stability: Cross-country evidence from OIC nations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 742–761. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2020-0468>
- Abubakar, A. M., Bala, K., & Saidin, S. Z. (2021). Fintech, institutional quality, and bank performance: Global evidence. *International Journal of Finance & Economics*, 26(4), 5731–5745. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1971>
- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2019). Islamic banking regulation and risk-taking: Empirical evidence from Saudi Arabia. *Pacific-Basin Finance Journal*, 57, 101176. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101176>
- Alam, S., Abdullah, M., & Hassan, M. K. (2022). Islamic banking efficiency in GCC countries:

- Comparative evidence from Saudi Arabia. *International Review of Economics & Finance*, 80, 259–278.
<https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.013>
- Alharbi, A. (2021). Contributions of Islamic finance to economic growth: A Saudi Arabian perspective. *Borsa Istanbul Review*, 21(2), 120–139. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.10.004>
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2018). Financial stability of Islamic banks in GCC: Does governance matter? *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 56, 42–62.
<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.02.017>
- Baita, A. J., Umar, U. H., & Shawa, J. S. (2024). Islamic banking and financial development: A cross-country analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 7(2).
<https://doi.org/10.18196/ijief.v7i2.19579>
- Bekkin, R. (2019). Islamic finance in Russia: Institutional barriers and opportunities. *Journal of Islamic Studies*, 30(3), 321–345. <https://doi.org/10.1093/jis/ety054>
- Ben Slimen, R., & Belhaj, F. (2022). Banking efficiency: A comparative study between Islamic and conventional banks in GCC countries. *Copernican Journal of Finance & Accounting*,
<https://doi.org/10.12775/cjfa.2022.005>
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chiad, F., & Gherbi, A. (2024). The role of Islamic banks in promoting economic growth and financial stability: Evidence from Saudi Arabia. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(3), 357–369. [http://dx.doi.org/10.21511/imfi.21\(3\).2024.29](http://dx.doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.29)
- Danlami, M. R., Abduh, M., & Razak, L. A. (2023). Social finance, institutional quality and stability of Islamic banks: Evidence from four countries. *International Journal of Social Economics*, 50(8), 1186–1216. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2022-0441>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Garaev, I. (2020). Islamic finance in Russia: Dynamics of development and legal challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1011–1030. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0220>
- Gubareva, M., & Kiselakova, D. (2023). Institutional quality, financial regulation, and economic stability in emerging markets. *Sustainability*, 15(4), 3291. <https://doi.org/10.3390/su15043291>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Paltrinieri, A. (2020). A review of Islamic banking governance: Global regulatory and institutional challenges. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 1190–1223.
<https://doi.org/10.1111/joes.12380>
- Husnayani, F., Alam, M. A., & Wahyudi, R. (2022). Banking efficiency: Islamic vs conventional evidence. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1).
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art11>
- Irman, F. (2024). Improving the Islamic banks competitiveness through efficiency. *Islamic Economics*

- Methodology (IEM)*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/iem.v1i1.100>
- Irsyad, M., Chairiyati, F., & Rachmadi, E. (2024). Do ESG performance improve bank stability? *JMES*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/jmes.2024.032-06>
- Ismail, A. G. (2020). Institutional development and Islamic financial growth: A global review. *Emerging Markets Finance & Trade*, 56(12), 3321–3335. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1703104>
- Juliani, D., & Ridha, M. A. (2022). The nexus between intellectual capital and Islamic bank performance. *JBMIB*. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2202>
- Mobin, M., Rahman, A., & Ismail, A. (2021). Institutional quality and Islamic banking development: Evidence from OIC countries. *International Journal of Finance & Economics*, 26(4), 5731– 5745. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1967>
- Naceur, S. B., & Kandil, M. (2018). Impact of bank regulations on Islamic bank performance. *International Review of Financial Analysis*, 55, 144–159. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.10.003>
- Rosidi, R., Nugraha, R. A., & Ayuning, I. L. (2024). How Islamic corporate governance mitigates financing risk? Share: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.21469>
- Saleem, K., Malik, M. S., & Qamar, A. (2022). Regulatory quality and financial stability: Comparative study of Islamic and conventional banks. *Journal of Financial Stability*, 58, 100961. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100961>
- Safiullin, M., Elshin, L., & Kuznetsov, Y. (2025). Prospects for blockchain technologies in Islamic finance. *Journal of Sustainable Competitive Intelligence*, 15, Article 530. <https://doi.org/10.37497/eagleSustainable.v15i.530>
- Suhail, S., & Nurzaman, M. S. (2020). Efficiency of Islamic banks in Indonesia, Saudi Arabia, and the UK. *Etikonomi*, 19(2), 237–270. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15862>
- Theoretical Economics. (2025). Islamic banking in BRICS countries: Current state and prospects. *Theoretical Economics*, 3, 53–67. <https://doi.org/10.52957/2221-3260-2025-3-53-67>
- Taufiq, T., & Razali, R. (2024). Financial inclusion and Islamic bank efficiency. Share: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22894>
- Visser, H. (2019). *Islamic finance: Principles and practice* (3rd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Putri, M. S., Windiani, R., & Paramasatya, S. (2021). Liberalisasi ekonomi Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030. *Journal of International Relations*, 7(3), 123–130. <https://doi.org/10.14710/jirud.v7i3.31216>